



Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



Rencana Strategis

2024-2026



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	8
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3. Kinerja Pelayanan perangkat	16
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan.....	19
2.5. Mitra Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan perangkat Daerah.....	23
3.2. Isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	29
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
5.1. Strategi	32
5.2. Arah Kebijakan.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator kinerja utama.....	54

7.2. Penentuan target penyelenggaraan bidang urusan pemerintah daerah melalui indikator kinerja kunci (IKK)	56
BAB VIII PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Bapenda berdasarkan Esselon dan Golongan.....	13
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Bapenda berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Bapenda berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.4 Data Aset Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.....	15
Tabel 2.5 Data Capaian Kinerja Sasaran Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.....	17
Tabel 2.6 Jenis-jenis Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	21
Tabel 6.1 Rencana Kinerja Program dan Pendanaan.....	31
Tabel 6.2 Rencana Kinerja Kegiatan	37
Tabel 6.3 Rencana Kinerja Sub Kegiatan	41
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama.....	55
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci.....	56
Tabel 7.3 Rincian Indikator Kinerja Kunci	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur...	11
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	12
Gambar 2.3 Capaian Kinerja Tujuan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.....	17
Gambar 2.4 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan.....	18
Gambar 2.5 Rasio Anggaran Belanja terhadap Target Pendapatan	19
Gambar 4.1 Cascading Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Amanat dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bahwa untuk Daerah yang masa berlaku RPJMD berakhir pada tahun 2023, agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024 – 2026, serta seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026.

Perencanaan strategis ini merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.

Perencanaan Strategis sering juga disebut Perencanaan Jangka Panjang (*Long Range Planning*) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab serta sumber daya manusia yang diperlukan, singkatnya perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.

Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategis terfokus kepada apakah organisasi mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visi-nya. Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi.

Pada sisi lain terdapat kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi tersebut. Kemampuan atau ketidak mampuan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama di luar organisasi akan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal menjalankan misinya dan mewujudkan visinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 2000 No 54. Tambahan Lembaran Negara No 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Bapenda adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
- 3.2 Isu Strategis Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.
- 4.2 Cascading Kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Bapenda Prov. Kaltim.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bapenda Prov. Kaltim.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pelayanan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok "Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi"

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;
- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD Badan Pendapatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatanteknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD PPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Badan Pendapatan Daerah di bidang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Retribusi, serta melaksanakan urusan ketatausahaan. Didalam melaksanakan tugasnya UPTD PPRD memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan Retribusi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tersebut diatas komposisi struktur sebagai berikut :

A. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, membawahi:

- Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
 - Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
- Sub Bidang Pendataan, Administrasi, dan Keberatan Pajak;
 - Sub Bidang PKB dan BBNKB;
 - Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahi:
- Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - Sub Bidang Penerimaan Lain-lain;
 - Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi:
- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
 - Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang – Undangan.

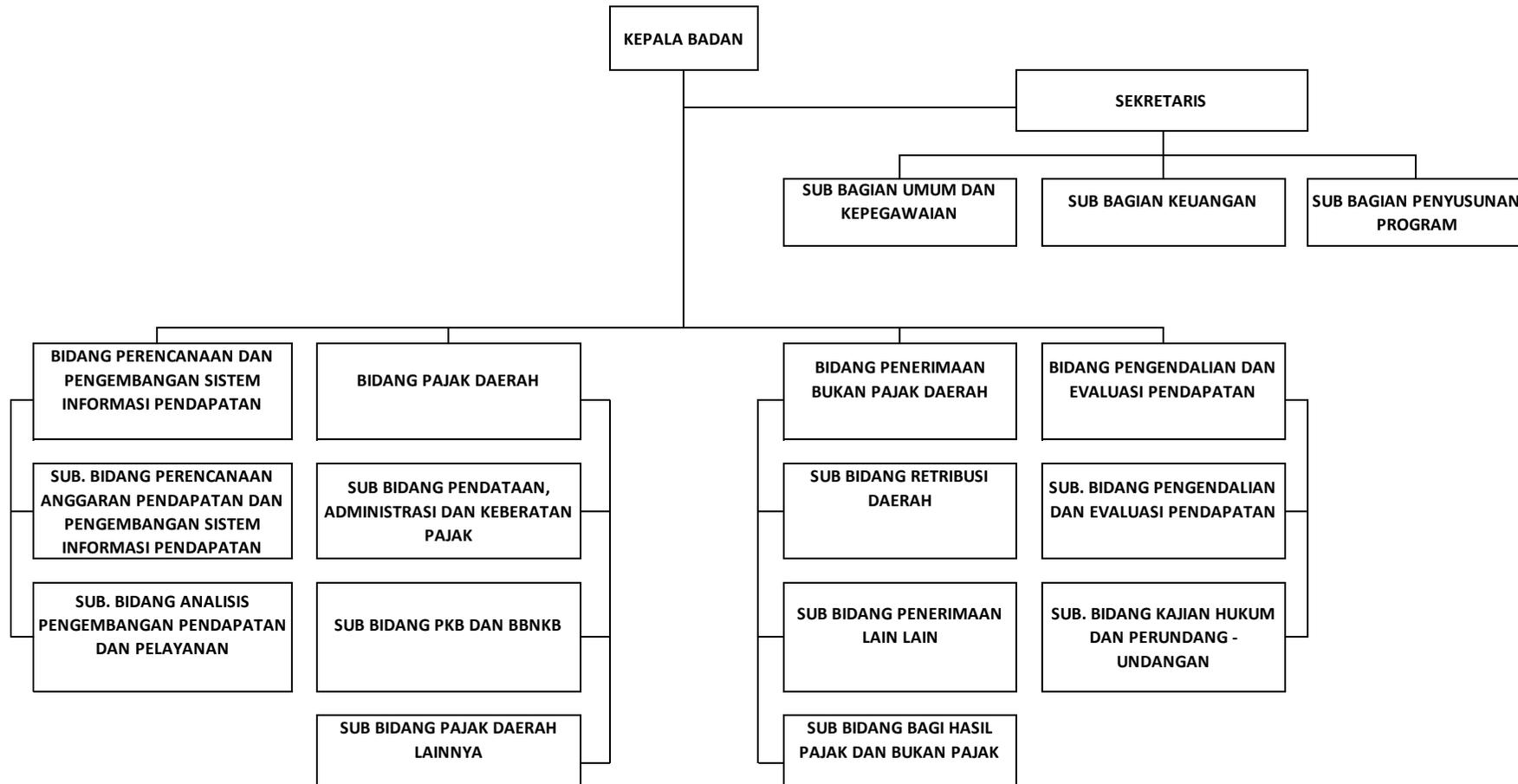
B. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur (UPTD PPRD)

- a. Kepala UPTD
- b. Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan
- d. Seksi Pembukuan dan Penagihan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Gambar 2

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2022 mempunyai personil sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) orang yang bertugas baik di Provinsi dan tersebar di 9 UPTD Se-Kalimantan Timur yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) Pejabat Struktural, yang terdiri dari Eselon II , III dan IV beserta 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang staf.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah: 1 (satu) orang Eselon II, 14 (empat belas) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala UPTD, serta 40 (empat puluh) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubag, 10 (sepuluh) Kasubid dan 9 (sembilan) orang Kasubag di UPTD dan 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi di seluruh UPTD.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM
BERDASARKAN ESELON DAN GOLONGAN TAHUN 2022**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	ESELON				GOLONGAN				JUMLAH
		II	III	IV	STAF	I	II	III	IV	
1	BAPENDA PROV. KALTIM	1	5	12	40	2	20	23	13	58
2	UPTD PPRD SAMARINDA		1	3	36	1	14	23	2	40
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN		1	3	27		23	4	4	31
4	UPTD PPRD PPU		1	3	18		17	3	2	22
5	UPTD PPRD KUTIM		1	3	23	1	20	3	3	27
6	UPTD PPRD KUKAR		1	3	36	2	25	11	2	40
7	UPTD PPRD KUBAR		1	3	24	0	22	5	1	28
8	UPTD PPRD BONTANG		1	3	16	2	11	6	1	20
9	UPTD PPRD BERAU		1	3	18	1	15	3	3	22
10	UPTD PPRD PASER		1	3	15	1	12	5	1	19
JUMLAH		1	14	39	253	10	179	86	32	307

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Daerah untuk pemenuhan pembiayaan daerah. Komposisi jumlah pegawai Bapenda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berikut adalah tabel komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 2.2

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM
BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2022**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	S2	S1	D4	D3	SMA/ Sederajat	SMP	SD	JUMLAH
1	BAPENDA PROV. KALTIM	18	15	0	10	12	1	2	58
2	UPTD PPRD SAMARINDA	7	11		5	15	1	1	40
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN	4	1	0	18	8	0	0	31
4	UPTD PPRD PPU	2	2	0	14	3	1	0	22
5	UPTD PPRD KUTIM	3	1	0	17	5	0	1	27
6	UPTD PPRD KUKAR	1	10	0	17	10	0	2	40
7	UPTD PPRD KUBAR	1	3	1	17	6	0	0	28
8	UPTD PPRD BONTANG	1	5	0	9	3	1	1	20
9	UPTD PPRD BERAU	3	4	0	12	2	0	1	22
10	UPTD PPRD PASER	2	3	0	6	6	1	1	19
JUMLAH		42	55	1	125	70	5	9	307

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2021

Komposisi pegawai Bapenda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 185 orang laki-laki atau 60,26% dan perempuan sebanyak 122 Orang atau 39,74% yang berarti jumlah pegawai laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah pegawai perempuan sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

**REKAPITULASI PEGAWAI BAPENDA PROV. KALTIM BERDASARKAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2022**

NO	INSTANSI/ UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BAPENDA PROV. KALTIM	30	28	58
2	UPTD PPRD SAMARINDA	24	16	40
3	UPTD PPRD BALIKPAPAN	16	15	31
4	UPTD PPRD PPU	16	6	22
5	UPTD PPRD KUTIM	17	10	27
6	UPTD PPRD KUKAR	29	11	40
7	UPTD PPRD KUBAR	15	13	28
8	UPTD PPRD BONTANG	11	9	20
9	UPTD PPRD BERAU	16	6	22
10	UPTD PPRD PASER	11	8	19
JUMLAH		185	122	307

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sarana dan prasarana yang tersebar di Bapenda Provinsi dan seluruh UPT Bapenda se Kalimantan Timur. seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

DATA ASET BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA BARANG		JUMLAH / UNIT									
			Prov.	SMD	BPP	Kukar	Bontang	Kutim	Kubar	Paser	PPU	Berau
1	Tanah	Tanah Bangunan Kantor/Rumah	1	5	5	4	2	1	2	2	2	4
2	Gedung & Bangunan		8	9	23	15	9	15	16	6	13	11
3	Peralatan dan Mesin	Alat - Alat Besar	10	6	3	4	1	1	4	2	-	3
		Alat - Alat Angkutan	89	9	2	12	5	9	3	14	9	7
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	40	38	1	12	7	8	3	23	1	3
		Alat Pertanian	1	15	1	1	3	-	4	-	-	-
		Alat Kantor & Rumah Tangga	3699	1525	470	606	506	219	708	323	220	240
		Alat Studio & Alat Komunikasi	199	97	30	84	58	12	52	22	14	13
		Alat - Alat Kedokteran	11	-	1	-	-	-	3	4	-	-
		Alat Laboratorium	113	73	25	58	43	6	15	18	3	5
4	Aset Tetap Lainnya	Buku dan Perpustakaan	232	8	35	31	-	5	62	57	64	14
Jumlah			4.403	1.785	596	827	634	276	872	471	326	300

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis-jenis Pelayanan :

1. Pajak Daerah
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan
 - e) Pajak Rokok
2. Retribusi Daerah :
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Perusda Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
 - a) Bagian Laba Perusahaan Daerah
 - b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
 - c) Kontribusi Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - a) Hasil Penjualan barang Milik Daerah
 - b) Penerimaan Jasa Giro
 - c) Penerimaan Bunga Deposito
 - d) Penerimaan TP/TGR
 - e) Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - f) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 - g) Pendapatan Dari Pengembalian
 - h) Sumbangan Pihak Ketiga
5. Dana Perimbangan
 - a) Bagi Hasil Pajak
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan
 - 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - 3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps 21
 - b) Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Provisi Sumber Daya Hutan
 - 2) Landrent

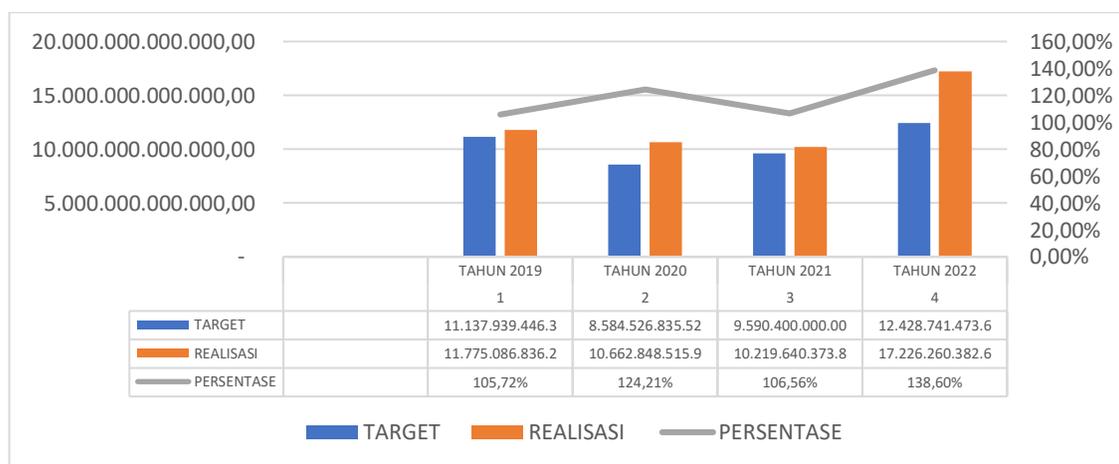
- 3) Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi
- 4) Minyak Bumi
- 5) Gas Alam
- c) Dana Alokasi Umum

2.3.2. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2022 sesuai dengan Tujuan Renstra Bapenda Provinsi Kaltim tahun 2019 – 2023 yaitu “Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah” dengan Sasarannya “Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah” dan “Penambahan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan usaha/ pekerjaan di provinsi kalimantan timur” secara umum dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3

CAPAIAN KINERJA TUJUAN BAPENDA TAHUN 2019 S/D 2022



Tabel 2.5

CAPAIAN KINERJA SASARAN BAPENDA TAHUN 2019 S/D 2022

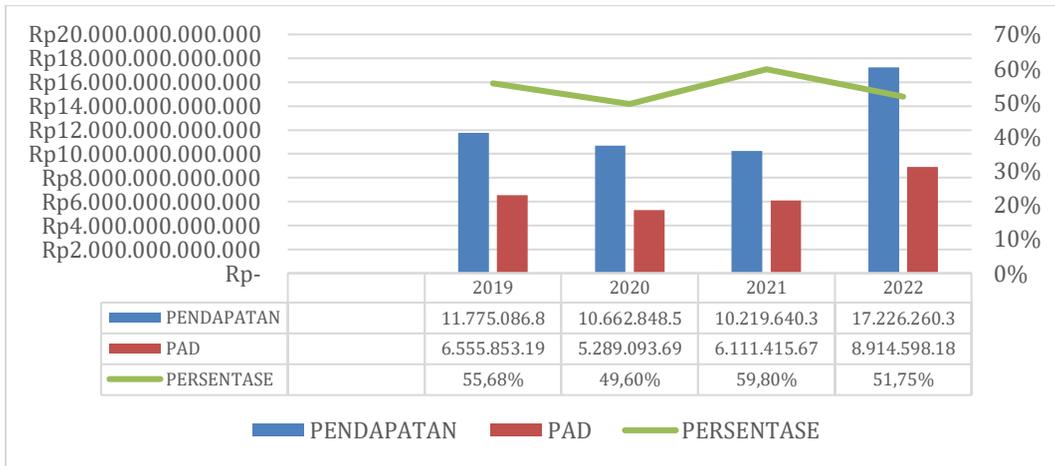
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra PD					Realisasi				Proyeksi	Rasio Keberhasilan					Catatan
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022*		2023	2019	2020	2021	2022*	
1	Persentase peningkatan pendanaan pembangunan daerah setiap tahunnya	3,84	3,84				7,91	-9,45				205,99	-246,09	0,00	0,00	0,00	Pada Tahun 2020 terjadi pandemi covid 19
2	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.396.942.567.871	5.986.210.931.582	7.023.469.699.224			6.190.163.670.244	7.052.525.781.319	7.023.469.699.224	0,00	0,00	114,70	117,81	100,00	Meski masih dibayangi pandemi covid-19, Kaltim mengalami perbaikan ekonomi
3	Jumlah Realisasi Dana Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah			4.193.457.432.129	5.052.407.690.162	5.098.972.547.513			3.900.968.548.756	5.400.543.643.373	5.098.972.547.513	0,00	0,00	93,03	106,89	100,00	pada Tahun 2021 hingga Tahun ini.

Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 – 2022 terhadap pendapatan masih besar yaitu 52 s/d 55 persen.

Sedangkan Perimbangan Keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dilihat dari tahun 2019 – 2022 sebesar 45 s/d 48 persen sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 4

KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH



Sumber data : Badan Pendapatan Prov. Kaltim

Dilihat dari gambar diatas kinerja pelayanan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 s/d 2022 terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya :

- a) Pada Tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.
- b) Konsumsi rumah tangga / daya beli masyarakat sebagai penopang ekonomi mengalami kontraksi sehingga berpengaruh pada penjualan / pembelian kendaraan bermotor.

Dari sisi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga terjadi fluktuasi sehingga menghambat jalannya kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5



Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 129.066,64 km² dengan 10 Kabupaten dan Kota, 103 Kecamatan, serta 1.032 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.501.232 Jiwa. Sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

1. Masyarakat Umum
2. Perangkat Daerah yang mempunyai pendapatan
3. Perusahaan perusahaan yang mempunyai kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah provinsi.

Dalam rangka melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa tantangan, disamping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya :

Tantangan :

- a. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
- b. Perlunya optimalisasi manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik.
- c. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas KKN.
- d. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan manajemen kinerja dan tuntutan pengembangan organisasi yang berkualitas dan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten.
- e. Jumlah lifting migas yang menunjukkan angka penurunan, Harga dan Kurs rupiah terhadap dolar yang sulit diprediksi menjadikan penetapan asumsi DBH SDA dipatok pada angka yang aman.

Peluang :

- a. Dengan banyaknya pelayanan yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan didaerah yg terpencil akan memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.
- b. Peningkatan kerjasama dengan perbankan dalam rangka mendukung pengembangan model pembayaran pajak.
- c. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim telah berinovasi dalam rangka pembayaran Pajak maupun Retribusi yang sudah berbasis Electronic Trading Platform (ETP) yang merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik seperti pembayaran pajak melalui LinkAja, Tokopedia dan lainnya.
- d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

2.5. MITRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan selalu berkolaborasi dengan mitra kerja antara lain yaitu:

1. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. PT. Jasa Raharja
3. PT. Bankaltimara
4. Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terdapat jenis – jenis layanan yang sudah dilakukan di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangan layanan / inovasi layanan seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6

JENIS – JENIS PELAYANAN

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN / KETERANGAN
1	SAMSAT PENUH	11
2	SAMSAT PEMBANTU	28
3	SAMSAT PAYMENT POINT	18
4	SAMSAT CORNER	3
5	SAMSAT KELILING	6
6	SAMSAT JELAJAH	2
7	SAMSAT DRIVE THRU	4
8	SAMSAT TERAPUNG	1
9	SAMSAT DESA	10
10	E-SAMSAT	BANKALTIMTARA, BNI, BANK MANDIRI, BCA, BTN, BRI SYARIAH, INDOMARET, PT.PEGADAIAN, PT. POS INDONESIA
11	SAMSAT DELIVERY POS (SADELPOS)	KANTOR POS SAMARINDA, BALIKPAPAN, BONTANG, TENGGARONG, TANJUNG REDEB

Pada tahun 2019 s/d 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan beberapa pelayanan diantaranya :

- Layanan E Samsat Pegadaian, 10 Januari 2019.

- Samsat penuh Samarinda Seberang Kota Samarinda, 24 Oktober 2019.
- Samsat penuh Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, 4 Desember 2019.
- Samsat Mall Mesra Indah.
- Samsat penuh Long Ikis Kabupaten Paser, 2 Juli 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Palaran Kota Samarinda, 31 Agustus 2020.
- Samsat Pembantu Berbas Pantai Kota Bontang, 1 September 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Muara Komam Kabupaten Paser, 9 November 2020.
- Samsat Payment Point Bankaltimtara KPC Segah, Batu Putih, Tanjung Batu Kabupaten Berau, 19 November 2020.
- Samsat Paten Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, 30 November 2020.
- Layanan Samsat Penuh Jl. MT. Haryono Kota Samarinda, 29 Desember 2020.
- Cetak Online Digital (Condi) Simpator, Inovasi Terbaik Perangkat Daerah Kalimantan Timur dalam Kompetisi Penjaringan Peserta Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (Pepes Ikan Peda) 2020.
- E-Samsat Bhabinkamtibnas.
- E-Samsat LinkAja.
- E Samsat Tokopedia.
- E Samsat Pay Bankaltimtara.
- Sistem Informasi Pemberitahuan Masa Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPAN JAJA).
- Jemput Pajak Online Melalui Operasional Kendaraan Kantor (JEMPOL OK).
- Pembuatan Aplikasi Pelaporan Elektronik Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor E-WAPU.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan permasalahan dan menentukan isu strategis secara tepat dalam rangka mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi Tujuan dan Sasarannya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan.

Dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026, maka Renstra Bapenda Prov. Kaltim tahun 2024 – 2026 untuk memberikan dukungan arah dan sasaran dalam kinerjanya untuk mencapai target RPD Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

➤ Faktor Internal

A. Kekuatan

- Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.
- Jumlah dan lokasi Unit layanan yang tersebar diseluruh penjurur wilayah di Kalimantan Timur.
- Sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Sistem pembayaran pajak melalui digitalisasi yang sudah diterapkan.

B. Kelemahan

- Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang semakin berkurang khususnya yang berada didaerah yang jauh lokasinya.

- Sarana prasarana operasional peralatan dan perlengkapan yang perlu ditingkatkan secara terus menerus khususnya peralatan pelayanan.
- Sistem Basis Data Wajib Pajak yang belum maksimal.
- Belum dilakukan perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).
- Kurangnya pengawasan penjualan/distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Timur.

➤ **Faktor Eksternal**

A. Peluang

- Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.
- Perkembangan dinamika nasional dan internasional
- Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik.
- Semakin meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait.
- Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

B. Ancaman

- Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
- Belum maksimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Kalimantan Timur yang potensial menyumbang pendapatan Retribusi Daerah.
- Kurangnya sanksi terhadap kelalaian menyetorkan Deviden ke Kas Daerah.
- Fluktuasi Dana Transfer yang tidak stabil karena kondisi harga minyak dunia dan kurs rupiah terhadap dolar.
- Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelaahan unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman baik dari internal maupun eksternal maka permasalahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

MASALAH POKOK :

- Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah
- Belum optimalnya pelayanan publik perangkat daerah
- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

MASALAH :

- Belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah berbasis digitalisasi
- Belum optimalnya kualitas Layanan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah

AKAR MASALAH :

- Belum optimalnya penyusunan perencanaan pendapatan daerah
- Menurunnya tarif PKB dan BBNKB
- Masih tingginya piutang pajak daerah
- Berkurangnya jenis pemungutan retribusi 13 menjadi 8 jenis
- Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronifikasi
- Belum tersedianya system informasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 1 Thn 2022
- Database berbasis digital belum aktual
- Belum terlaksananya Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- Proses Perencanaan dan Penganggaran serta pelaporan yang masih belum optimal
- Pemetaan SDM yang belum sesuai kompetensinya
- Penyediaan sarana dan prasarana belum memadai

3.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan rencana strategis karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan berdasarkan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah dengan identifikasi secara nasional dan regional. Adapun isu strategis Bapenda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- ✚ Penerapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- ✚ Terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- ✚ Masih Rentannya Kemandirian Fiskal Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Yudikatif, Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten / Kota, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPD tahun 2026.

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi melaksanakan **Tujuan ke 4 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi”** dan **Sasaran ke 11 “Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAklhak”** yang tertuang didalam RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim selama kurun waktu Tahun 2024 - 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Adapun indikator tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah angka absolut seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Indikator Tujuan	Satuan	Target		
		2024	2025	2026
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah	Miliar Rp.	18,850	19,450	21,300

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Persen	100	100	100
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	9.510.000.000.000	10.335.000.000.000	11.235.000.000.000
2	Meningkatnya layanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna layanan (IKM)	Skor	≥86,80	≥86,90	≥87,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akip	78,50	79,30	80,01

Formula perhitungan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

✚ Rasio Efektifitas :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

✚ Realisasi PAD : **Angka Absolut**

✚ Indeks kepuasan pengguna layanan (IKM):

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

✚ Nilai Akip perangkat daerah : **Hasil Penilaian Inspektorat Daerah**

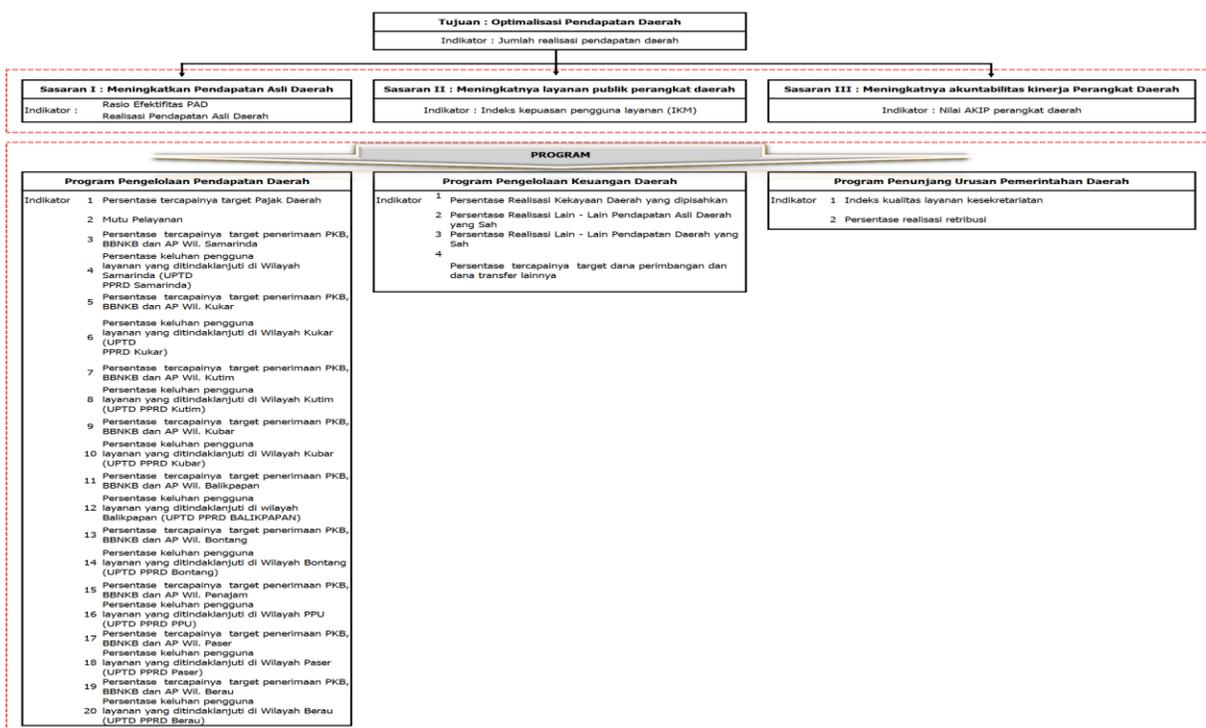
4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit / pegawai yang lebih tinggi ke level unit / pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat proses penjabaran dan penyelarasan yang berawal dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1

CASCADING KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN



KEGIATAN		
<p>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah realisasi Pajak Daerah</p> <p>2 Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah</p> <p>3 Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBMM</p> <p>4 Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat</p> <p>5 Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah</p> <p>6 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda</p> <p>7 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar</p> <p>8 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim</p> <p>9 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar</p> <p>10 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan</p> <p>11 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang</p> <p>12 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam</p> <p>13 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser</p> <p>14 Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau</p>	<p>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</p> <p>2 Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <p>3 Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</p>	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu</p>
	<p>Kegiatan Penunjang</p> <p>Indikator 1 Jumlah realisasi Penerimaan Transfer</p>	<p>Administrasi Keuangan</p> <p>Indikator 1 Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</p>
		<p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu</p>
		<p>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah</p>
		<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</p>
		<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</p>
		<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</p>
		<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
		<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</p>

SUB KEGIATAN		
<p>Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</p>	<p>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</p>	<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>
<p>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah</p> <p>2 Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</p>	<p>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</p>	<p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p>
<p>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p>		<p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p>
<p>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</p>		<p>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</p>
<p>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p>		<p>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</p>
<p>Penetapan Wajib Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</p>		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>
<p>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti</p>		<p>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>
<p>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</p>		<p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Indikator 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</p>
<p>Penagihan Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</p>		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p>
<p>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti</p>		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p>
<p>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan</p> <p>2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</p>		<p>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</p>
<p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</p>		<p>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p>
<p>Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</p>		<p>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</p> <p>Indikator 1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</p>

Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
Indikator	1 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
Indikator	1 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
Indikator	1 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
Pengolahan Data Retribusi Daerah	
Indikator	1 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
Indikator	1 Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
Indikator	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
Indikator	1 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
Indikator	1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Indikator	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Indikator	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Indikator	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Indikator	1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Indikator	1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Indikator	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Indikator	1 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	
Indikator	1 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Indikator	1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Indikator	1 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Indikator	1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Indikator	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Indikator	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Indikator	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Indikator	1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Indikator	1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Indikator	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

5.1. STRATEGI

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success faktor*). Berikut strategi-strategi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Optimalisasi pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah berbasis digitalisasi.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Optimalisasi implementasi Standar pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan langkah - langkah yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung target RPD tahun 2024 – 2026. Adapun arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian potensi pendapatan daerah.
2. Merumuskan rencana proyeksi Pendapatan Daerah.
3. Merumuskan kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah.
4. Membuat perda dan petunjuk teknis pajak daerah.
5. Peningkatan kualitas pemutakhiran data pajak daerah.
6. Manajemen identitas wajib pajak dengan memanfaatkan NIK.
7. Meningkatkan Kerjasama dengan Kab/ Kota dan instansi terkait.
8. Sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah.
9. Intensifikasi, ekstensifikasi dan elektronifikasi retribusi daerah.
10. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait.
11. Merumuskan kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah.
12. Membuat perda dan petunjuk teknis Retribusi Daerah.
13. Penerapan ETPD pada pajak & retribusi daerah.
14. Pembuatan dan pengembangan system informasi Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Meningkatkan pemutakhiran database sistem.
16. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kriteria penilaian.
17. Peningkatan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
18. Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
19. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan.
20. Pelaksanaan SKM.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024 -2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bapenda Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Dengan berpedoman kepada Kepmendagri No. 50-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun Program dan kegiatan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai berikut :

PROGRAM

1. Program penunjang urusan daerah provinsi.
2. Program pengelolaan keuangan daerah.
3. Program pengelolaan pendapatan daerah.

KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

 **SUB KEGIATAN**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
13. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
14. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
15. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
16. Pengolahan Data Retribusi Daerah
17. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
18. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
20. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
21. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
22. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
23. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
27. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
28. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31. Pengadaan Mebel

32. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
42. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
43. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
44. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
45. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
46. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
47. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
48. Penetapan Wajib Pajak Daerah
49. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
50. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
51. Penagihan Pajak Daerah
52. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
53. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
54. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
55. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Adapun rencana pendanaan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTB se Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Kinerja Program dan Pendanaan

UNIT	URAIAN	INDIKATOR						PENDANAAN		
		KONDISI KINERJA AWAL	TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR	SATUAN	2024	2025	2026
			2024	2025	2026					
Bapenda Provinsi								244.418.320.000	286.811.694.000	306.348.036.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	72	75	76	77	77	Indek	226.873.344.200	267.512.220.620	285.118.615.282
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	100	100	Persen	2.074.616.500	2.282.078.150	2.510.285.965
- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	93	100	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	155.000.000
	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100	100	100	100	100	Persen	129.000.000	141.500.000	155.850.000
	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	100	100	100	100	Persen	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100	100	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	155.000.000
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100	100	100	100	100	Persen	13.835.359.300	15.218.895.230	16.742.284.753
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persen	150.000.000	165.000.000	180.000.000
UPTD PPRD Samarinda								8.969.793.000	9.631.063.000	10.344.205.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	72	75	76	77	77	Indek	8.231.930.600	8.819.414.360	9.451.391.496
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	100	100	100	100	100	Persen	69.484.800	76.433.280	84.076.608
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100	100	100	100	100	Persen	483.671.200	522.038.320	564.242.152
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100	100	100	100	100	Persen	184.706.400	213.177.040	244.494.744
UPTD PPRD Kukar								7.611.884.000	8.320.991.000	9.104.556.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	72	75	76	77	77	Indek	6.946.556.040	7.589.130.244	8.299.509.168
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	100	100	100	100	100	Persen	76.560.000	84.216.000	92.637.600
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	100	100	100	100	100	Persen	526.067.960	578.674.756	636.542.232
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100	100	100	100	100	Persen	62.700.000	68.970.000	75.867.000
UPTD PPRD Kutim								4.610.993.000	4.935.208.000	5.282.263.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	72	75	76	77	77	Indek	4.176.922.000	4.457.729.900	4.757.037.090
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	100	100	100	100	100	Persen	170.236.000	187.259.600	205.985.560
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100	100	100	100	100	Persen	227.810.000	250.591.000	275.650.100
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100	100	100	100	100	Persen	36.025.000	39.627.500	43.590.250

UNIT	URAIAN	INDIKATOR						PENDANAAN		
		KONDISI KINERJA AWAL	TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR	SATUAN	2024	2025	2026
			2024	2025	2026					
UPTD PPRD Kubar								4.764.541.000	5.098.058.000	5.454.923.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	72	75	76	77	77	Indek	4.207.514.200	4.485.328.520	4.780.920.572
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	100	100	100	100	100	Persen	89.760.000	98.736.000	108.609.600
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	100	100	100	100	100	Persen	384.854.800	423.340.280	465.674.308
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100	100	100	100	100	Persen	82.412.000	90.653.200	99.718.520
UPTD PPRD Balikpapan								7.315.790.000	7.827.895.000	8.375.847.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	72	75	76	77	77	Indek	6.917.623.000	7.389.911.300	7.894.064.930
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	100	100	100	100	100	Persen	45.540.000	50.094.000	55.103.400
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100	100	100	100	100	Persen	269.797.000	296.776.700	326.454.370
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100	100	100	100	100	Persen	82.830.000	91.113.000	100.224.300
UPTD PPRD Bontang								4.426.852.000	4.736.731.000	5.068.302.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	72	75	76	77	77	Indek	4.009.358.000	4.277.487.600	4.563.134.260
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	100	100	100	100	100	Persen	27.720.000	30.492.000	33.541.200
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	97	100	100	100	100	Persen	297.214.000	321.935.400	349.128.940
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)	100	100	100	100	100	Persen	92.560.000	106.816.000	122.497.600
UPTD PPRD PPU								4.406.423.000	4.714.872.000	5.044.913.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	72	75	76	77	77	Indek	3.836.933.200	4.088.433.220	4.355.830.342
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	100	100	100	100	100	Persen	42.372.000	46.609.200	51.270.120
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100	100	100	100	100	Persen	405.927.000	441.519.700	480.671.670
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (UPTD PPRD PPU)	100	100	100	100	100	Persen	121.190.800	138.309.880	157.140.868
UPTD PPRD Paser								4.506.687.000	4.822.155.000	5.159.705.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	72	75	76	77	77	Indek	3.906.065.000	4.161.470.800	4.432.952.380
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	100	100	100	100	100	Persen	27.720.000	30.492.000	33.541.200
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	99	100	100	100	100	Persen	468.637.000	500.500.700	535.550.770
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	100	100	100	100	100	Persen	104.265.000	129.691.500	157.660.650
UPTD PPRD Berau								4.572.708.000	4.892.797.000	5.235.293.000
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	72	75	76	77	77	Indek	3.995.234.400	4.257.576.040	4.536.549.944
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	100	100	100	100	100	Persen	109.982.400	120.980.640	133.078.704
- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100	100	100	100	100	Persen	384.991.200	423.490.320	465.839.352
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	100	100	100	100	100	Persen	82.500.000	90.750.000	99.825.000
JUMLAH								295.603.991.000	341.791.464.000	365.418.043.000

Tabel 6.2
Rencana Kinerja Kegiatan

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR	PENDANAAN							
			Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
				2024	2025	2026				
SEKRETARIAT							226.873.344.200	267.512.220.620	285.118.615.282	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	7	7	7	Dokumen / Laporan	799.012.500	878.913.750	966.805.125	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	309	309	309	Orang	163.872.924.410	198.261.758.848	208.993.107.333	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	4	4	4	Laporan	304.964.000	335.460.400	369.006.440	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	10	10	10	Orang	1.792.348.800	1.971.583.680	2.168.742.048	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	10	10	10	Buah	7.908.004.500	8.698.804.950	9.568.685.445	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10	10	10	Unit	39.292.339.000	42.871.572.900	46.808.730.190	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5	5	Jenis	10.880.653.790	11.968.719.172	13.165.591.089	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	170	170	170	Unit	2.023.097.200	2.525.406.920	3.077.947.612	
KABID BUKAN PAJAK							2.257.420.000	2.483.162.000	2.731.478.200	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	772.420.000	849.662.000	934.628.200	
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	244,444	264,373	295,304	Milyar Rupiah	385.000.000	423.500.000	465.850.000	
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	951,308	1.007,373	1.063,423	Milyar Rupiah				
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,861	13,864	13,867	Milyar Rupiah				
5 02 02 1.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,048	7,505	8,081	Triliun Rupiah	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	
KABID PAJAK							8.935.740.000	9.829.314.000	10.812.245.400	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah	8,300	9,050	9,860	Triliun Rupiah	8.935.740.000	9.829.314.000	10.812.245.400	
KABID PPSIP							4.062.715.800	4.468.987.380	4.915.886.118	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah	3	3	3	Dokumen	836.456.500	920.102.150	1.012.112.365	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah	3	3	3	Dokumen	3.226.259.300	3.548.885.230	3.903.773.753	
		Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	2	2	Predikat				
		Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	2	2	2	Aplikasi				
KABID PEP							2.289.100.000	2.518.010.000	2.769.811.000	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah	7	7	7	Dokumen	465.740.000	512.314.000	563.545.400	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	22	22	22	Dokumen	1.823.360.000	2.005.696.000	2.206.265.600	

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR	PENDANAAN							
			Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
				2024	2025	2026				
KA UPT PPRD SAMARINDA						8.969.793.000	9.631.063.000	10.344.205.000		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	58.080.608	63.888.000	70.276.800	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	100.680.000	110.748.000	121.822.800	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	69.484.800	76.433.280	84.076.608	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	29.040.000	31.944.000	35.138.400	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	612.343.424	673.577.766	740.935.543	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	484.540.760	532.994.836	586.294.320	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	6.450.870.258	6.860.248.653	7.296.309.218	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	496.375.550	546.013.105	600.614.416	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	766,544	820,902	899,353	Milyar Rupiah	668.377.600	735.215.360	808.736.896	
KA UPT PPRD KUTAI KARTANEGARA						7.611.884.000	8.320.991.000	9.104.556.000		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	23.100.974	25.410.000	27.951.000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	100.920.000	111.012.000	122.113.200	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	76.560.000	84.216.000	92.637.600	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	38.280.000	42.108.000	46.318.800	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	937.115.850	1.030.827.435	1.133.910.179	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	231.462.550	254.608.805	280.069.686	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	4.981.178.406	5.427.215.918	5.921.403.410	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	634.498.260	697.948.086	767.742.895	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutai	422,078	453,188	497,119	Milyar Rupiah	588.767.960	647.644.756	712.409.232	
KA UPT PPRD KUTAI TIMUR						4.610.993.000	4.935.208.000	5.282.263.000		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	45.650.086	50.215.000	55.236.500	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	89.760.000	98.736.000	108.609.600	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	170.236.000	187.259.600	205.985.560	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	48.180.000	52.998.000	58.297.800	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	473.140.250	520.454.275	572.499.703	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	413.222.150	454.544.365	499.998.802	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	2.492.434.824	2.604.794.101	2.718.807.711	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	614.534.690	675.988.159	743.586.975	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302,437	325,752	358,904	Milyar Rupiah	263.835.000	290.218.500	319.240.350	

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR	PENDANAAN							
			Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
				2024	2025	2026				
KA UPT PPRD KUTAI BARAT						4.764.541.000	5.098.058.000	5.454.923.000		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	33.440.865	36.784.000	40.462.400	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	89.760.000	98.736.000	108.609.600	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	89.760.000	98.736.000	108.609.600	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	46.200.000	50.820.000	55.902.000	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	475.351.360	522.886.496	575.175.146	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	247.148.300	271.863.130	299.049.443	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	2.815.941.219	2.954.599.192	3.097.118.311	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	499.672.456	549.639.702	604.603.673	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutai	120,931	129,070	140,424	Milyar Rupiah	467.266.800	513.993.480	565.392.828	
KA UPT PPRD BALIKPAPAN						7.315.790.000	7.827.895.000	8.375.847.000		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	19.672.204	21.638.478	23.802.326	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	111.120.000	122.232.000	134.455.200	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	45.540.000	50.094.000	55.103.400	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	22.440.000	24.684.000	27.152.400	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	736.709.820	810.380.802	891.418.882	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	494.932.020	544.425.222	598.867.744	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	4.475.934.736	4.704.055.156	4.939.623.171	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	1.056.814.220	1.162.495.642	1.278.745.206	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	811,649	868,838	951,615	Milyar Rupiah	352.627.000	387.889.700	426.678.670	
KA UPT PPRD BONTANG						4.426.852.000	4.736.731.000	5.068.302.000		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Persen	29.040.857	31.944.000	35.138.400	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran	80	85	90	Persen	90.240.000	99.264.000	109.190.400	
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	27.720.000	30.492.000	33.541.200	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	Persen	48.840.000	53.724.000	59.096.400	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	859.163.690	945.080.059	1.039.588.065	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100	100	100	Persen	215.134.139	236.647.553	260.312.308	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100	100	100	Persen	2.245.014.614	2.336.710.818	2.428.279.800	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100	100	100	Persen	521.924.700	574.117.170	631.528.887	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	151,389	160,701	174,139	Milyar Rupiah	389.774.000	428.751.400	471.626.540	

KODE	KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR				PENDANAAN	
			Target			Satuan	2024	2025
			2024	2025	2026			
KA UPT PPRD PENAJAM PASER UTARA							4.406.423.000	4.714.872.000
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	2	2	Dokumen	28.512.827	31.363.200
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	42.372.000	46.609.200
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4	4	4	Dokumen / Laporan	56.100.000	61.710.000
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	7	7	Buah	788.118.043	866.929.848
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	2	2	2	Paket	76.802.440	84.482.684
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	6	Jenis	2.376.870.200	2.482.364.829
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	2	2	2	Paket	510.529.690	561.582.659
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	93,785	99,968	108,777	Milyar Rupiah	527.117.800	579.829.580
KA UPT PPRD PASER							4.506.687.000	4.822.155.000
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	2	2	Dokumen	22.880.882	25.168.000
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	27.720.000	30.492.000
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4	4	4	Dokumen / Laporan	45.540.000	50.094.000
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	7	7	Buah	985.619.800	1.084.181.780
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	2	2	2	Paket	77.657.250	85.422.975
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	6	Jenis	2.311.258.048	2.407.184.123
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	2	2	2	Paket	463.109.020	509.419.922
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172,533	184,337	200,523	Milyar Rupiah	572.902.000	630.192.200
KA UPT PPRD BERAU							4.572.708.000	4.892.797.000
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	2	2	Dokumen	45.620.050	50.181.120
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,080	15,035	16,226	Milyar Rupiah	109.982.400	120.980.640
5 02 01 1.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4	4	4	Dokumen / Laporan	44.000.000	48.400.000
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	7	7	7	Buah	569.252.640	626.177.904
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	2	2	2	Paket	512.679.420	563.947.362
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	6	Jenis	2.264.849.510	2.354.153.596
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	2	2	2	Paket	558.832.780	614.716.058
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170,154	182,244	199,146	Milyar Rupiah	467.491.200	514.240.320

Tabel 6.3
Rencana Kinerja Sub Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
BAPENDA PROV. KALTIM							244.418.320.000	286.811.694.000	306.348.036.000
SUBAG PROGRAM							799.012.500	878.913.750	966.805.125
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3	Dokumen	220.000.000	242.000.000	266.200.000
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	128.645.000	141.509.500	155.660.450
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	Dokumen	17.545.000	19.299.500	21.229.450
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	14	14	Laporan	314.985.000	346.483.500	381.131.850
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	Laporan	117.837.500	129.621.250	142.583.375
SUBAG KEUANGAN DAN ASET							214.150.049.110	253.516.596.018	269.723.428.220
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309	309	309	Orang / Bulan	163.645.404.520	198.008.486.969	208.712.508.266
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	415	415	415	Dokumen	515.520.000	567.072.000	623.779.200
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	Laporan	70.000.000	80.000.000	90.000.000
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	19	19	Laporan	157.519.890	173.271.879	190.599.067
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	10	10	Dokumen	175.164.000	192.680.400	211.948.440
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	36	36	Laporan	129.800.000	142.780.000	157.058.000
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	3	3	Paket	563.200.000	619.520.000	681.472.000
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	1	Paket	110.000.000	121.000.000	133.100.000
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	4	Paket	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	2	2	Paket	4.476.884.500	4.924.572.950	5.417.030.245
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	72	72	72	Dokumen	21.120.000	23.232.000	25.555.200

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	0	0	Dokumen	175.000.000	-	-
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	2	Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	4	4	Paket	375.000.000	1.605.000.000	1.665.500.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	197	222	249	Unit	4.950.000.000	4.445.000.000	4.989.500.000
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	1	1	Unit	29.522.339.000	32.474.572.900	35.722.030.190
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6	6	6	Unit	3.770.000.000	3.847.000.000	3.931.700.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.870.000.000	2.057.000.000	2.262.700.000
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	17	Unit	416.891.200	458.580.320	504.438.352
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	150	150	Unit	756.206.000	831.826.600	915.009.260
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	Unit	850.000.000	1.235.000.000	1.658.500.000
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN							11.924.282.590	13.116.710.852	14.428.381.937
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	10	10	Dokumen	207.000.000	220.000.000	250.000.000
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	10	10	Dokumen	300.548.800	338.303.680	364.134.048
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70	75	80	Orang	360.800.000	396.880.000	436.568.000
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	75	80	Orang	360.800.000	396.880.000	436.568.000
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63	72	84	laporan	2.200.000.000	2.420.000.000	2.662.000.000
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	11.000.000	12.100.000	13.310.000
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	laporan	8.484.133.790	9.332.547.172	10.265.801.889
SUBID PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN							2.971.433.300	3.268.576.630	3.595.434.293
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	2	Dokumen	464.244.000	510.668.400	561.735.240
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	2	Dokumen	746.577.700	821.235.470	903.359.017
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13	13	13	Laporan	880.305.800	968.336.380	1.065.170.018
5 02 04 1.01 14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20	15	10	Laporan	880.305.800	968.336.380	1.065.170.018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR						PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026	
			2024	2025	2026					
SUBID ANALISIS PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAN PELAYANAN							1.091.282.500	1.200.410.750	1.320.451.825	
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	372.212.500	409.433.750	450.377.125	
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1	1	1	Dokumen	719.070.000	790.977.000	870.074.700	
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	1	Laporan				
SUBID RETRIBUSI DAERAH							772.420.000	849.662.000	934.628.200	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3	3	3	Laporan	281.820.000	310.002.000	341.002.200	
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3	3	3	Dokumen	254.100.000	279.510.000	307.461.000	
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	236.500.000	260.150.000	286.165.000	
SUBID PENERIMAAN LAIN - LAIN							385.000.000	423.500.000	465.850.000	
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	4	4	Dokumen	385.000.000	423.500.000	465.850.000	
SUBID BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK							1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4	4	4	Laporan	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	
SUBID PENDATAAN, ADMINISTRASI DAN KEBERATAN PAJAK							434.940.000	478.434.000	526.277.400	
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	4	4	Dokumen	271.700.000	298.870.000	328.757.000	
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4	4	4	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	163.240.000	179.564.000	197.520.400	
SUBID PKB DAN BBNKB							7.400.800.000	8.140.880.000	8.954.968.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	2	2	Laporan	7.400.800.000	8.140.880.000	8.954.968.000	
SUBID PAJAK DAERAH LAINNYA							1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	3	3	Dokumen	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR				PENDANAAN			
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
SUBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN						1.247.620.000	1.372.382.000	1.509.620.200	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	4	4	4	Dokumen LHP	925.760.000	1.018.336.000	1.120.169.600
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9	9	9	Laporan			
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	3	3	Laporan	321.860.000	354.046.000	389.450.600
SUBID KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG UNDANGAN						1.041.480.000	1.145.628.000	1.260.190.800	
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	465.740.000	512.314.000	563.545.400
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9	9	9	Laporan	575.740.000	633.314.000	696.645.400

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
UPTD PPRD WILAYAH SAMARINDA							8.969.793.000	9.631.063.000	10.344.205.000
SUBAG TATA USAHA							8.231.930.600	8.819.414.360	9.451.391.496
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	58.080.608	63.888.000	70.276.800
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	95	95	95	Dokumen	100.680.000	110.748.000	121.822.800
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	6	7	Orang	29.040.000	31.944.000	35.138.400
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	7.610.460	8.371.506	9.208.657
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	282.362.740	310.599.014	341.658.915
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	57.372.304	63.109.534	69.420.488
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	2.133.120	2.346.432	2.581.075
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	10	laporan	262.864.800	289.151.280	318.066.408
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	104.729.700	335.202.670	368.722.937
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	12	Unit	379.811.060	197.792.166	217.571.383
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	3.300.000	3.630.000	3.993.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	1.112.829.630	1.224.112.593	1.346.523.852
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	5.334.740.628	5.632.506.060	5.945.792.366
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	12	Unit	171.283.750	188.412.125	207.253.338
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	11	12	Unit	150.000.280	155.000.308	160.500.339
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	175.091.520	202.600.672	232.860.739
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							392.213.200	436.434.520	485.077.972
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	19.958.400	21.954.240	24.149.664
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	19.958.400	21.954.240	24.149.664
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	167.590.000	179.349.000	192.283.900
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	184.706.400	213.177.040	244.494.744
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							345.649.200	375.214.120	407.735.532
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	29.568.000	32.524.800	35.777.280
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	84	92	101	Dokumen SSPD	316.081.200	342.689.320	371.958.252

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
UPTD PPRD WILAYAH KUTAI KARTANEGARA							7.611.884.000	8.320.991.000	9.104.556.000
SUBAG TATA USAHA							6.946.556.040	7.589.130.244	8.299.509.168
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	23.100.974	25.410.000	27.951.000
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	73	73	73	Dokumen	100.920.000	111.012.000	122.113.200
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	8	9	Orang	38.280.000	42.108.000	46.318.800
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.657.200	7.322.920	8.055.212
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	613.001.620	674.301.782	741.731.960
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	27.305.190	30.035.709	33.039.280
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	4.266.240	4.692.864	5.162.150
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	14	14	laporan	285.885.600	314.474.160	345.921.576
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	70.631.660	77.694.826	85.464.309
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	13	13	Unit	160.830.890	176.913.979	194.605.377
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	2.780.910	3.059.001	3.364.901
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	1.174.925.620	1.292.418.182	1.421.660.000
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	3.803.471.876	4.131.738.735	4.496.378.509
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	15	Unit	432.012.680	475.213.948	522.735.343
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61	67	74	Unit	92.012.580	101.213.838	111.335.222
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	110.473.000	121.520.300	133.672.330
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							284.625.000	313.087.500	344.396.250
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	28.380.000	31.218.000	34.339.800
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	19.140.000	21.054.000	23.159.400
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	174.405.000	191.845.500	211.030.050
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	62.700.000	68.970.000	75.867.000
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							380.702.960	418.773.256	460.650.582
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	29.040.000	31.944.000	35.138.400
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	75	82	91	Dokumen SSPD	351.662.960	386.829.256	425.512.182

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR						PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026	
			2024	2025	2026					
UPTD PPRD WILAYAH KUTAI TIMUR								4.610.993.000	4.935.208.000	5.282.263.000
SUBAG TATA USAHA								4.176.922.000	4.457.729.900	4.757.037.090
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	45.650.086	50.215.000	55.236.500	
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	62	62	62	Dokumen	89.760.000	98.736.000	108.609.600	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	10	11	Orang	48.180.000	52.998.000	58.297.800	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	24.304.500	26.734.950	29.408.445	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	159.183.750	175.102.125	192.612.338	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	Paket	34.854.600	38.340.060	42.174.066	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	11.021.120	12.123.232	13.335.555	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	23	23	laporan	243.776.280	268.153.908	294.969.299	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	107.876.560	118.664.216	130.530.638	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	12	Unit	305.345.590	335.880.149	369.468.164	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	5.500.000	6.050.000	6.655.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	806.570.160	887.227.176	975.949.894	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	1.680.364.664	1.711.516.925	1.736.202.818	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	Unit	308.542.850	339.397.135	373.336.849	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	54	54	Unit	139.616.840	153.578.524	168.936.376	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	166.375.000	183.012.500	201.313.750	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							300.476.000	330.523.600	363.575.960	
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	66.440.000	73.084.000	80.392.400	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	50.996.000	56.095.600	61.705.160	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	147.015.000	161.716.500	177.888.150	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	36.025.000	39.627.500	43.590.250	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							133.595.000	146.954.500	161.649.950	
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	52.800.000	58.080.000	63.888.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	271	298	327	Dokumen SSPD	80.795.000	88.874.500	97.761.950	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR	PENDANAAN							
			Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
				2024	2025	2026				
UPTD PPRD WILAYAH KUTAI BARAT						4.764.541.000	5.098.058.000	5.454.923.000		
SUBAG TATA USAHA						4.207.514.200	4.485.328.520	4.780.920.572		
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	33.440.865	36.784.000	40.462.400	
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	92	92	92	Dokumen	89.760.000	98.736.000	108.609.600	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	9	10	Orang	46.200.000	50.820.000	55.902.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.600.000	7.260.000	7.986.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	165.946.000	182.540.600	200.794.660	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	22.242.990	24.467.289	26.914.018	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	3.910.720	4.301.792	4.731.971	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	19	19	laporan	276.651.650	304.316.815	334.748.497	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	74.699.000	82.168.900	90.385.790	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	11	12	Unit	172.449.300	189.694.230	208.663.653	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	5.500.000	6.050.000	6.655.000	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	633.546.763	696.901.438	766.591.582	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	2.176.894.456	2.251.647.753	2.323.871.728	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	7	Unit	252.999.656	278.299.622	306.129.585	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	57	57	Unit	81.895.000	90.084.500	99.092.950	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	164.777.800	181.255.580	199.381.138	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							336.160.000	369.776.000	406.753.600	
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	41.580.000	45.738.000	50.311.800	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	19.800.000	21.780.000	23.958.000	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	192.368.000	211.604.800	232.765.280	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	82.412.000	90.653.200	99.718.520	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							220.866.800	242.953.480	267.248.828	
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	28.380.000	31.218.000	34.339.800	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	760	836	920	Dokumen SSPD	192.486.800	211.735.480	232.909.028	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
UPTD PPRD WILAYAH BALIKPAPAN							7.315.790.000	7.827.895.000	8.375.847.000
SUBAG TATA USAHA							6.917.623.000	7.389.911.300	7.894.064.930
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	19.672.204	21.638.478	23.802.326
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	86	86	86	Dokumen	111.120.000	122.232.000	134.455.200
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	4	5	Orang	22.440.000	24.684.000	27.152.400
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.440.500	7.084.550	7.793.005
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	191.151.620	210.266.782	231.293.460
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	20.102.500	22.112.750	24.324.025
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	11.000.000	12.100.000	13.310.000
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	25	laporan	508.015.200	558.816.720	614.698.392
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	55.000.000	60.500.000	66.550.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	22	24	Unit	439.932.020	483.925.222	532.317.744
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	1.650.000	1.815.000	1.996.500
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	1.313.239.400	1.444.563.340	1.589.019.674
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	3.161.045.336	3.257.676.816	3.348.606.997
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	15	Unit	485.023.220	533.525.542	586.878.096
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114	114	114	Unit	132.561.000	145.817.100	160.398.810
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	439.230.000	483.153.000	531.468.300
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							161.997.000	178.196.700	196.016.370
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	25.740.000	28.314.000	31.145.400
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	10.560.000	11.616.000	12.777.600
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	42.867.000	47.153.700	51.869.070
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	82.830.000	91.113.000	100.224.300
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							236.170.000	259.787.000	285.765.700
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	103	114	125	Dokumen SSPD	226.930.000	249.623.000	274.585.300

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR					PENDANAAN		
		Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
			2024	2025	2026				
UPTD PPRD WILAYAH BONTANG							4.426.852.000	4.736.731.000	5.068.302.000
SUBAG TATA USAHA							4.009.358.000	4.277.487.600	4.563.134.260
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	29.040.857	31.944.000	35.138.400
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	41	41	41	Dokumen	90.240.000	99.264.000	109.190.400
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	10	11	Orang	48.840.000	53.724.000	59.096.400
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.868.400	7.555.240	8.310.764
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	312.955.500	344.251.050	378.676.155
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	59.556.750	65.512.425	72.063.668
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	4.266.240	4.692.864	5.162.150
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	19	19	laporan	475.516.800	523.068.480	575.375.328
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	27.500.000	30.250.000	33.275.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	10	10	Unit	187.634.139	206.397.553	227.037.308
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	3.300.000	3.630.000	3.993.000
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	347.124.030	381.836.433	420.020.076
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	1.894.590.584	1.951.244.385	2.004.266.724
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	10	Unit	201.384.700	221.523.170	243.675.487
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67	67	67	Unit	40.150.000	44.165.000	48.581.500
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	280.390.000	308.429.000	339.271.900
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							228.074.000	250.881.400	275.969.540
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	117.034.000	123.737.400	131.111.140
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	92.560.000	106.816.000	122.497.600
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							189.420.000	208.362.000	229.198.200
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	497	547	602	Dokumen SSPD	180.180.000	198.198.000	218.017.800

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR	PENDANAAN							
			Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
				2024	2025	2026				
UPTD PPRD WILAYAH PENAJAM						4.406.423.000	4.714.872.000	5.044.913.000		
SUBAG TATA USAHA						3.836.933.200	4.088.433.220	4.355.830.342		
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	28.512.827	31.363.200	34.499.520	
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	75	75	75	Dokumen	100.800.000	110.880.000	121.968.000	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	12	13	Orang	56.100.000	61.710.000	67.881.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	15.786.870	17.365.557	19.102.113	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	370.895.633	407.985.197	448.783.717	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	20.441.300	22.485.430	24.733.973	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	4.266.240	4.692.864	5.162.150	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	19	19	laporan	376.728.000	414.400.800	455.840.880	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.022.060	6.624.266	7.286.693	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	6	7	Unit	70.780.380	77.858.418	85.644.260	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	10.367.500	11.404.250	12.544.675	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	434.047.153	477.451.867	525.197.054	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	1.831.655.547	1.882.628.712	1.929.445.383	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	10	10	Unit	246.723.180	271.395.498	298.535.048	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	67	67	Unit	66.180.510	72.798.561	80.078.417	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	197.626.000	217.388.600	239.127.460	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN						271.758.800	303.934.680	339.328.148		
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	14.124.000	15.536.400	17.090.040	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	14.124.000	15.536.400	17.090.040	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	122.320.000	134.552.000	148.007.200	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	121.190.800	138.309.880	157.140.868	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN						297.731.000	322.504.100	349.754.510		
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	14.124.000	15.536.400	17.090.040	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	1272	1399	1539	Dokumen SSPD	283.607.000	306.967.700	332.664.470	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/URAIAN	INDIKATOR	PENDANAAN							
			Uraian	Target			Satuan	2024	2025	2026
				2024	2025	2026				
UPTD PPRD WILAYAH PASER							4.506.687.000	4.822.155.000	5.159.705.000	
SUBAG TATA USAHA							3.906.065.000	4.161.470.800	4.432.952.380	
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	22.880.882	25.168.000	27.684.800	
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	72	72	Dokumen	100.800.000	110.880.000	121.968.000	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	10	11	Orang	45.540.000	50.094.000	55.103.400	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	17.821.100	19.603.210	21.563.531	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	331.123.980	364.236.378	400.660.016	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	113.919.080	125.310.988	137.842.087	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	2.279.640	2.507.604	2.758.364	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	25	laporan	520.476.000	572.523.600	629.775.960	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	22.657.250	24.922.975	27.415.273	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	4	Unit	55.000.000	60.500.000	66.550.000	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	5.456.880	6.002.568	6.602.825	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	666.144.380	732.758.818	806.034.700	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	1.538.856.788	1.557.542.737	1.568.631.511	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	16	Unit	181.300.790	199.430.869	219.373.956	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112	112	112	Unit	67.308.230	74.039.053	81.442.958	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	214.500.000	235.950.000	259.545.000	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN							304.005.000	336.405.500	372.046.050	
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	9.240.000	10.164.000	11.180.400	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	181.260.000	186.386.000	192.024.600	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	104.265.000	129.691.500	157.660.650	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN							296.617.000	324.278.700	354.706.570	
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	9.240.000	10.164.000	11.180.400	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	106	116	128	Dokumen SSPD	287.377.000	314.114.700	343.526.170	

UPTD PPRD WILAYAH BERAU								4.572.708.000	4.892.797.000	5.235.293.000
SUBAG TATA USAHA								3.995.234.400	4.257.576.040	4.536.549.944
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	Dokumen	45.620.050	50.181.120	55.199.232	
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	116	116	116	Dokumen	90.240.000	99.264.000	109.190.400	
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	6	7	Orang	44.000.000	48.400.000	53.240.000	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	6.597.800	7.257.580	7.983.338	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	137.500.000	151.250.000	166.375.000	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	90.548.480	99.603.328	109.563.661	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	Dokumen	3.732.960	4.106.256	4.516.882	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	35	35	laporan	330.873.400	363.960.740	400.356.814	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	1	Paket	77.077.660	84.785.426	93.263.969	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	18	19	Unit	435.601.760	479.161.936	527.078.130	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	laporan	17.590.760	19.349.836	21.284.820	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	laporan	359.878.310	395.866.141	435.452.755	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	5	laporan	1.797.140.440	1.839.673.619	1.876.857.281	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	17	Unit	195.405.980	214.946.578	236.441.236	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	96	96	Unit	82.478.000	90.725.800	99.798.380	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	280.948.800	309.043.680	339.948.048	
SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN								351.982.400	387.180.640	425.898.704
5 02 01 1.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	1	Dokumen	43.989.000	48.387.900	53.226.690	
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4	4	4	Laporan	32.993.400	36.292.740	39.922.014	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	Laporan	192.500.000	211.750.000	232.925.000	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4	4	4	Laporan	82.500.000	90.750.000	99.825.000	
SEKSI PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN								225.491.200	248.040.320	272.844.352
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	Laporan	33.000.000	36.300.000	39.930.000	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	598	658	724	Dokumen SSPD	192.491.200	211.740.320	232.914.352	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026 adalah untuk menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkorelasi pada **Tujuan ke 4 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi”** dan **Sasaran ke 11 “Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAklhak”** Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.

7.1 PENENTUAN TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing - masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Berikut ini adalah IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024 - 2026;

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	Persen	127,58	100	100	100
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	8.997.262.537.258	9.510.000.000.000	10.335.000.000.000	11.235.000.000.000
2	Meningkatnya layanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna layanan (IKM)	Skor	86,65	≥86,80	≥86,90	≥87,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akip	75,71	78,5	79,3	80,01

7.2 PENENTUAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Tabel. 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

UNIT	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)					PENDANAAN			
	URAIAN	TARGET			SATUAN	2024	2025	2026	
		2024	2025	2026					
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	273.101.480.640	317.038.702.604	338.190.005.464
	2	Persentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	100	100	Persen	20.275.321.160	22.267.653.276	24.461.018.604
	3	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	100	100	Persen	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
	4	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	155.000.000
	5	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Persen	999.189.200	1.134.108.120	1.281.018.932
			295.603.991.000	341.791.464.000	365.418.043.000				

Perumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut didasarkan pada rincian IKK yang mana telah diselaraskan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 7.3

Rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

UNIT	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)					PENDANAAN			
	URAIAN	TARGET			SATUAN	2024	2025	2026	
		2024	2025	2026					
Bapenda Provinsi						244.418.320.000	286.811.694.000	306.348.036.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	226.873.344.200	267.512.220.620	285.118.615.282
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	2.074.616.500	2.282.078.150	2.510.285.965
	3	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	155.000.000
	4	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100	100	100	Persen	129.000.000	141.500.000	155.850.000
	5	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100	100	100	Persen	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000
	6	Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100	100	100	Persen	128.000.000	141.000.000	155.000.000
	7	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	100	100	100	Persen	13.835.359.300	15.218.895.230	16.742.284.753
	8	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100	100	Persen	150.000.000	165.000.000	180.000.000
UPTD PPRD Samarinda						8.969.793.000	9.631.063.000	10.344.205.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	8.231.930.600	8.819.414.360	9.451.391.496
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	69.484.800	76.433.280	84.076.608
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	100	100	100	Persen	483.671.200	522.038.320	564.242.152
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100	100	100	Persen	184.706.400	213.177.040	244.494.744
UPTD PPRD Kukar						7.611.884.000	8.320.991.000	9.104.556.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	6.946.556.040	7.589.130.244	8.299.509.168
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	76.560.000	84.216.000	92.637.600
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	100	100	100	Persen	526.067.960	578.674.756	636.542.232
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100	100	100	Persen	62.700.000	68.970.000	75.867.000
UPTD PPRD Kutim						4.610.993.000	4.935.208.000	5.282.263.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	4.176.922.000	4.457.729.900	4.757.037.090
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	170.236.000	187.259.600	205.985.560
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	100	100	100	Persen	227.810.000	250.591.000	275.650.100
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100	100	100	Persen	36.025.000	39.627.500	43.590.250
UPTD PPRD Kubar						4.764.541.000	5.098.058.000	5.454.923.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	4.207.514.200	4.485.328.520	4.780.920.572
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	89.760.000	98.736.000	108.609.600
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	100	100	100	Persen	384.854.800	423.340.280	465.674.308
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100	100	100	Persen	82.412.000	90.653.200	99.718.520
UPTD PPRD Balikpapan						7.315.790.000	7.827.895.000	8.375.847.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	6.917.623.000	7.389.911.300	7.894.064.930
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	45.540.000	50.094.000	55.103.400
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100	100	100	Persen	269.797.000	296.776.700	326.454.370
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	100	100	100	Persen	82.830.000	91.113.000	100.224.300
UPTD PPRD Bontang						4.426.852.000	4.736.731.000	5.068.302.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	4.009.358.000	4.277.487.600	4.563.134.260
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	27.720.000	30.492.000	33.541.200
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100	100	100	Persen	297.214.000	321.935.400	349.128.940
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)	100	100	100	Persen	92.560.000	106.816.000	122.497.600
UPTD PPRD PPU						4.406.423.000	4.714.872.000	5.044.913.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	3.836.933.200	4.088.433.220	4.355.830.342
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	42.372.000	46.609.200	51.270.120
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100	100	100	Persen	405.927.000	441.519.700	480.671.670
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (UPTD PPRD PPU)	100	100	100	Persen	121.190.800	138.309.880	157.140.868
UPTD PPRD Paser						4.506.687.000	4.822.155.000	5.159.705.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	3.906.065.000	4.161.470.800	4.432.952.380
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	27.720.000	30.492.000	33.541.200
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100	100	100	Persen	468.637.000	500.500.700	535.550.770
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)	100	100	100	Persen	104.265.000	129.691.500	157.660.650
UPTD PPRD Berau						4.572.708.000	4.892.797.000	5.235.293.000	
	1	Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75	76	77	Indek	3.995.234.400	4.257.576.040	4.536.549.944
	2	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	100	100	100	Persen	109.982.400	120.980.640	133.078.704
	3	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100	100	100	Persen	384.991.200	423.490.320	465.839.352
	4	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)	100	100	100	Persen	82.500.000	90.750.000	99.825.000
	JUMLAH					295.603.991.000	341.791.464.000	365.418.043.000	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2024 – 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Tujuan dan sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi Kebijakan serta Program dan Kegiatan.

Terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran kemudian untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, langkah strategisnya diterjemahkan dalam 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 55 (lima puluh dua) sub kegiatan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya dan hasil gunanya sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan serta menjadi acuan dalam proses perencanaan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



DRA. HI ISMIATI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009